


The Radicalism of Hizb ut-Tahrir movement in Tajikistan After the Civil War (1995-2024)



Gerakan Radikalisme Hizbut-Tahrir Di Tajikistan Pasca-Perang Saudara (1995-2024)

Aril Dwi Muammar

 Universitas Jember, Indonesia

 240110301020@mail.unej.ac.id

Abstract

This study examines the development of the Hizb ut-Tahrir (HT) movement in Tajikistan during the post-civil war period, from 1995 to 2024. HT is a transnational pan-Islamist organization that rejects the modern nation-state system and advocates for the re-establishment of an Islamic caliphate. After the end of the civil war, Tajikistan faced major challenges, including weak state institutions, an identity crisis, and public dissatisfaction with the prevailing political system. In this context, HT emerged as an appealing ideological alternative for certain segments of society, particularly among youth, migrant workers, and marginalized communities. This research adopts a critical historical approach to trace how HT expanded through non-violent preaching (da'wah), established transnational networks, and utilized digital media. Although HT does not engage in violence, its ideology is perceived as a threat by the government due to its opposition to the state system. The government has responded with repressive measures such as banning the organization, arresting its members, and restricting religious activities. Over the past two decades, HT's presence has experienced fluctuations. Despite increasingly limited operational space, HT continues to reflect the underlying tension between state control and societal demand for political alternatives. This phenomenon highlights the importance of providing greater space for expression in post-conflict societies.

Keywords:

Hizb ut-Tahrir, Tajikistan, post-conflict, political Islam.

Received: 2025-06-02

Revised: 2025-06-26

Accepted: 2025-07-25

***Corresponding Author:**

Aril Dwi Muammar,
Universitas Jember,
Indonesia
240110301020@mail.unej.ac.id

© Copyright, 2025 The Author(s). This open-access article is distributed under an [Attribution-Share Alike 4.0 International \(CC BY-SA\)](#).



Pendahuluan

Setelah Tajikistan memproklamkan kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tahun 1991, negara ini tidak langsung menjadi negara yang utuh dan sejahtera, tetapi terjerumus ke dalam konflik internal yang tragis. Perang saudara Tajikistan, yang berlangsung dari Mei 1992 hingga Juni 1997, merupakan salah satu tragedi paling berdarah di Asia Tengah pasca-Soviet. Perang ini tidak hanya memakan korban jiwa lebih dari 50.000 orang, tetapi juga menyebabkan lebih dari 500.000 orang mengungsi, baik ke luar negeri maupun ke daerah-daerah yang berada di dalam negeri (Lynch, 2001, p. 55).

Konflik ini melibatkan pertempuran antara faksi pemerintah sekuler yang didukung oleh kelompok dari wilayah Leninabad dan Kulyab, melawan koalisi oposisi Islamis dan demokrat yang terdiri dari kelompok dari wilayah Garm, Gorno- Badakhshan, serta kelompok etnis Garmi dan Pamiri. Salah satu aktor utama oposisi adalah Islamic Renaissance Party of Tajikistan (IRPT), yang menuntut ruang partisipasi politik dan kebebasan beragama yang lebih luas setelah bertahun-tahun ditekan di bawah sistem Soviet (Heathershaw, 2009).

Awal mula atau akar dari konflik ini dapat ditelusuri pada tiga periode atau titik utama. Pertama, ketegangan ideologis antara kelompok yang ingin mempertahankan sisa struktur komunis-sekuler dan mereka yang ingin mendorong reformasi Islam politik. Kedua, persaingan antar-kelompok regional dan etnis, yang memperuncing konflik elite. Ketiga, kekosongan kekuasaan dan lemahnya institusi negara setelah bubarnya Uni Soviet membuat situasi semakin tidak terkendali (International Crisis Group, 2001).

Konflik ini mendapatkan perhatian internasional ketika negara-negara seperti, Rusia dan Uzbekistan memberikan dukungan militer kepada faksi pemerintah, sementara Iran dan Afghanistan dituduh memiliki simpati terhadap kelompok oposisi Islamis. Walaupun intervensi internasional tidak sebesar di konflik lain, tetapi dampaknya tetap signifikan dalam mempertahankan keberlangsungan kekuasaan kelompok tertentu di Dushanbe (Jonson, 2006).

Perang akhirnya berakhir melalui Kesepakatan Damai Umum (General Peace Agreement) yang ditandatangani pada 27 Juni 1997 di bawah mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kesepakatan tersebut memberikan ruang bagi reintegrasi kelompok oposisi ke dalam pemerintahan, pengesahan konstitusi baru, dan janji reformasi kelembagaan. IRPT sempat dilegalkan dan ikut serta dalam pemilu, sebelum akhirnya kembali dibubarkan pada 2015 (Nourzhanov & Bleuer, 2013, p. 102).

Dampak jangka panjang dari perang ini tidak hanya berupa kehancuran ekonomi dan sosial, tetapi juga terciptanya ruang kekuasaan yang lemah, yang kemudian dimanfaatkan oleh gerakan transnasional seperti Hizb ut-Tahrir (HT). Ketidakstabilan politik, represi berkelanjutan, dan kegagalan negara dalam memberikan identitas ideologis baru bagi masyarakat dan mendorong tumbuhnya simpati terhadap ide-ide alternatif seperti khilafah Islamiyah yang diusung oleh HT (International Crisis Group, 2003, p. 58).

Runtuhnya Uni Soviet membuat kawasan Asia Tengah mengalami transformasi sosial politik yang signifikan dan drastis atau kebangkitan kembali, salah satunya adalah kebangkitan identitas Islam. Selama tujuh dekade di bawah pemerintahan Uni Soviet, kawasan Asia tengah direpresi oleh rezim komunis, salah satunya Tajikistan. Tajikistan mengalami proses

ini yang ditandai dengan terjadinya peristiwa perang saudara (1992-1997) yang menjadi titik awal dan meninggalkan luka yang mendalam bagi negara dan masyarakat. Dalam kondisi ini, berbagai gerakan bermunculan, terutama gerakan Islam-politik yang memanfaatkan celah kekosongan ideologis dan lemahnya institusi negara, salah satunya adalah gerakan Hizb ut-Tahrir (HT). Gerakan ini memang terkenal dengan ideologinya yang radikal, tapi metode untuk memperjuangkan gerakannya secara eksplisit yang menghindari kekerasan.

Fenomena ini menjadi bagian penting dari dinamika pasca-konflik di Asia Tengah, di mana Islam politik memainkan peran ganda: sebagai kekuatan integratif sekaligus potensi ancaman terhadap negara yang belum sepenuhnya stabil. Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk menelaah bagaimana Hizb ut-Tahrir beroperasi di Tajikistan sejak berakhirnya perang saudara hingga tahun 2024, serta menilai respons negara dan faktor-faktor sosial-politik yang mendorong munculnya gerakan ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah analisis sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Kuntowijoyo (2003), yang melihat sejarah sebagai ilmu sosial yang menganalisa hubungan antara struktur kekuasaan, ideologi, dan dinamika sosial. Metode sejarah analisis dipilih, karena bertujuan untuk menggambarkan gerakan Hizb ut-Tahrir (HT) sebagai ekspresi ideologis atas realitas pasca-konflik yang penuh represi, ketimpangan, dan krisis identitas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat tahapan utama metode sejarah yang akan digunakan antara lain :

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)
Data dikumpulkan dari sumber primer seperti laporan organisasi internasional (seperti, International Crisis Group), publikasi resmi HT, serta peraturan negara terkait. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan analisis kebijakan.
2. Kritik Sumber
Kritik dilakukan secara eksternal (menilai keaslian dan otoritas sumber) dan internal (menilai isi dan konteks historis informasi) untuk memastikan validitas dan relevansi data yang digunakan (Kuntowijoyo, 2003, pp. 18-20).
3. Interpretasi
Proses penafsiran dilakukan dengan menempatkan fakta sejarah dalam konteks sosial-politik Tajikistan pasca-perang saudara. Analisis difokuskan pada relasi antara represi negara dan munculnya gerakan bawah tanah seperti HT.
4. Historiografi
Tahap akhir adalah penulisan narasi sejarah yang sistematis dan

argumentatif, yang menekankan bagaimana HT berkembang sebagai aktor ideologis alternatif dalam ruang pasca-konflik yang terbatas.

Penggunaan pendekatan sejarah kritis menjadikan penelitian ini mampu merekonstruksi HT bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi sebagai bentuk artikulasi sosial dari kelompok yang termarginalkan secara ideologis, sekaligus representasi dari perlawanan terhadap struktur kekuasaan pasca-perang.

Hasil Dan Pembahasan

Pada tahun 1997, Tajikistan mengalami tantangan besar dalam menata ulang negaranya yang di sebabkan oleh perang saudara, terutama segi kehidupan sosial- politiknya dan membangun stabilitas nasionalnya. Dalam proses transisi ini, Tajikistan mengalami hambatan yaitu dari berbagai gerakan Islam Politik mulai bermunculan dan menunjukkan pengaruhnya di arus kosongnya ideologis masyarakat dan ketidakpuasannya terhadap sistem sekuler atau sebuah sistem pemerintahan yang memisahkan urusan agama dari urusan negara dan kehidupan publik. Dari berbagai banyaknya gerakan Islam Politik, Hizb ut-Tahrir (HT) adalah salah satu kelompok Politik Islam yang paling menonjol dinamikanya. Gerakan kelompok ini adalah sebuah organisasi tradisional yang menentang adanya legitimasi pemerintahan sekuler dan menyuarakan untuk kembalinya pembentukan kekhalifahan Islam (Arya, 2022, pp. 53-58).

Adanya gerakan Hizb ut-Tahrir di Tajikistan yang tidak menjadi persoalan dalam negeri saja, akan tetapi menjadi masalah di sekitar perbatasan negara hingga internasional, karena keterkaitannya dan hubungannya dengan jaringan Politik Islam lintas negara membuat gerakan ini menarik perhatian. Walaupun gerakan ini (Hizb ut-Tahrir) menyuarakan gerakannya adalah gerakan non-kekerasan, tapi aktivitas ideologis dan dakwahnya yang mereka lakukan dipandang sebagai gerakan yang berpotensi mengancam kestabilan politik, terutama di kawasan perbatasan dengan negara Uzbekistan yang rentan dan di kalangan etnis minoritas seperti Uzbek (International Crisis Group, 2003, p 58). Karena gerakan HT yang semakin gencar membuat pemerintah Tajikistan membuat kebijakan yang represif untuk menekan dan merespons gerakan tersebut yang mencakup seperti pelanggaran organisasi, penangkapan anggota, dan memperkecil saluran media tentang penyebaran ideologi HT (Gupta, 2021, pp. 64-76).

Latar Sosial-Politik Tajikistan Pasca-Perang Saudara

Perang saudara yang mengguncang Tajikistan dari tahun 1992 hingga 1997 bukan hanya menghancurkan secara fisik, tetapi juga merobek struktur sosial dan politik negara yang baru merdeka dari Uni Soviet. Setelah konflik berakhir melalui kesepakatan damai, pemerintah Tajikistan menghadapi tugas berat untuk membangun kembali negara dari keruntuhan. Namun kenyataannya, institusi- institusi negara masih lemah,

kepercayaan masyarakat terhadap negara rendah, dan ruang politik menjadi semakin sempit.

Presiden Emomali Rahmon, yang memimpin sejak masa perang, memang berhasil menguatkan kekuasaannya. Namun, pendekatan yang ia pilih justru cenderung menyingkirkan lawan politik, termasuk kelompok-kelompok Islam moderat seperti Partai Renaissance Islam Tajikistan (IRPT). Awalnya, IRPT ikut dilibatkan dalam pemerintahan sebagai bagian dari rekonsiliasi. Namun seiring waktu, partai ini ditekan dan akhirnya dilarang pada tahun 2015. Langkah-langkah seperti ini mempersempit ruang bagi ekspresi politik Islam yang sah (International Crisis Group, 2003, p. 58; Arya, 2022, pp. 53-38).

Munculnya kekosongan besar baik secara ideologis maupun spiritual di tengah masyarakat sebagai dampak konsekuensinya. Negara tidak berhasil menawarkan arah baru yang bisa menggantikan sistem lama yang telah runtuh bersama Uni Soviet. Kekosongan ini kemudian dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan seperti Hizb ut-Tahrir (HT), yang menawarkan solusi dalam bentuk sistem khilafah Islamiyah. HT menyasar kaum muda, kelompok marjinal, dan masyarakat yang kecewa dengan sistem yang ada (Nourzhanov & Bleuer, 2013; Heathershaw, 2009).

Selain faktor politik, kondisi ekonomi juga menjadi pemicu. Banyak masyarakat Tajikistan hidup dalam kemiskinan, dan jutaan orang menjadi buruh migran di Rusia. Ketidakpastian ekonomi dan identitas ini menciptakan ruang bagi narasi alternatif seperti yang dibawa HT. Di saat negara menutup akses terhadap Islam politik moderat, HT tampil meskipun ilegal sebagai saluran alternatif untuk menyalurkan aspirasi keagamaan dan sosial.

Masuk dan Berkembangnya Hizb ut-Tahrir di Tajikistan

Hizb ut-Tahrir (HT) tidak muncul secara tiba-tiba di Tajikistan. Organisasi ini mulai menunjukkan aktivitasnya di Asia Tengah sejak pertengahan 1990-an, tak lama setelah negara-negara eks-Soviet mengalami transisi politik besar. Di Tajikistan sendiri, HT masuk melalui wilayah utara, khususnya daerah perbatasan yang dekat dengan Lembah Fergana, sebuah kawasan strategis yang membentang antara Tajikistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Lembah ini dikenal sebagai titik rawan karena padat penduduk dan memiliki sejarah panjang dalam aktivitas keagamaan Islam (Karagiannis, 2006, p. 55).

HT menyebarkan pengaruhnya bukan dengan kekerasan, melainkan melalui dakwah ideologis. Mereka menggunakan selebaran, diskusi tertutup, hingga pemanfaatan teknologi digital di kemudian hari. Fokus utama dakwah mereka adalah memperkenalkan kembali gagasan khilafah yaitu sistem pemerintahan Islam global sebagai alternatif dari sistem sekuler yang dianggap rusak dan menindas umat Islam. HT secara khusus mengekspos anak muda, mahasiswa, dan warga perkotaan yang mengalami kegelisahan sosial maupun kekecewaan terhadap pemerintah

(Tucker, 2012, pp. 41-43).

Berbeda dengan kelompok ekstremis bersenjata, HT menyatakan diri sebagai organisasi non-kekerasan. Namun, ideologi mereka tetap dianggap radikal karena menolak nasionalisme, demokrasi, dan bentuk-bentuk pemerintahan modern lainnya. Di Tajikistan, ide-ide ini dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional dan kesatuan negara, terutama karena HT juga membangun jaringan lintas batas yang kuat. Banyak dari aktivitasnya saling terkait dengan perkembangan HT di Uzbekistan dan Kyrgyzstan (Louw, 2007).

Seiring waktu, gerakan ini berkembang secara diam-diam. Mereka memanfaatkan lemahnya pengawasan negara, celah hukum, dan simpati diam-diam dari sebagian masyarakat yang melihat HT sebagai satu-satunya suara alternatif di tengah dominasi penuh pemerintah. Bahkan ketika pemerintah mulai melakukan penangkapan dan pelarangan organisasi, HT tetap bertahan dengan struktur yang fleksibel dan aktivitas yang semakin tertutup.

HT juga memanfaatkan diaspora Tajik di luar negeri, terutama para migran di Rusia, sebagai basis dukungan. Di sana, HT bebas menyebarkan ideologinya dengan lebih longgar, tanpa takut pengawasan yang ketat di dalam negeri. Melalui strategi ini, HT tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang bukan sebagai kekuatan terbuka di jalanan, melainkan sebagai gerakan bawah tanah yang menyebar dari mulut ke mulut, dari ruang privat ke ruang digital.

Ideologi dan Strategi Perjuangan Hizb ut-Tahrir

Hizb ut-Tahrir (HT) bukan sekadar organisasi politik biasa, tetapi juga membawa visi ideologis yang sangat kuat dan terstruktur. Tujuan utamanya bukan untuk mereformasi sistem negara yang ada, melainkan menggantinya secara total dengan sistem khilafah yaitu pemerintahan global Islam yang diyakini akan menyatukan seluruh umat Muslim di bawah satu kepemimpinan politik dan spiritual.

HT menolak demokrasi, sekularisme, kapitalisme, dan nasionalisme, karena semuanya dianggap bertentangan dengan hukum Islam (syariah). Dalam perspektif mereka, konsep negara bangsa seperti Tajikistan, Uzbekistan, atau bahkan Indonesia adalah warisan kolonial yang memecah belah umat Islam. Maka dari itu, HT berusaha membangkitkan kembali identitas pan-Islamisme dengan sistem pemerintahan yang berbasis pada syariah dan dipimpin oleh seorang khalifah (Khamidov, 2003).

Yang menarik, meskipun ideologi mereka radikal, HT justru menolak penggunaan kekerasan dalam perjuangannya. Strategi utama mereka adalah dakwah yang menyebarkan ide lewat selebaran, ceramah, kelompok belajar, hingga media sosial dan situs daring. Mereka percaya bahwa perubahan sejati harus terjadi dari bawah, dimulai dari masyarakat yang sadar dan setuju terhadap visi khilafah, lalu meluas hingga mengubah sistem negara secara menyeluruh. Inilah yang disebut HT sebagai “perubahan pemikiran

dan opini umum” (International Crisis Group, 2003, p. 55).

Di Tajikistan, strategi ini terlihat dari pola aktivitas mereka. HT bekerja secara tertutup dalam kelompok-kelompok kecil, merekrut anggota baru melalui jejaring sosial pribadi dan aktivitas agama informal. Dalam banyak kasus, HT masuk ke masjid-masjid, kelompok pengajian, dan bahkan kampus-kampus, khususnya di wilayah urban atau komunitas migran (Tucker, 2012, pp. 41-43).

Namun, meski HT secara eksplisit menghindari aksi kekerasan, banyak pemerintah di Asia Tengah tetap menganggap ideologi mereka sebagai ancaman serius. Hal ini karena ajaran HT mengandung unsur penghasutan terhadap negara, mengajak masyarakat menolak sistem konstitusional, dan secara terang-terangan menyebarkan paham yang bertentangan dengan dasar negara. Di Tajikistan, pemerintah melihat HT sebagai kelompok yang berpotensi mendorong ketidakstabilan, terutama karena mereka tidak hanya aktif secara nasional, tapi juga terkait dengan jaringan lintas negara yang luas (Louw, 2007).

Dalam banyak kasus, ide-ide HT dianggap berperan dalam membentuk iklim radikalisasi meski tanpa aksi langsung. Ketika ruang publik dikontrol ketat oleh negara dan saluran politik legal ditutup, HT menawarkan “jalan alternatif” yang terdengar idealis bagi mereka yang kecewa, marjinal, atau mengalami krisis identitas. Inilah mengapa, walaupun dilarang, HT terus mendapatkan simpati diam-diam, khususnya di kalangan pemuda dan migran.

Respons Negara terhadap Aktivitas Hizb ut-Tahrir

Sejak awal kemunculannya di Tajikistan, Hizb ut-Tahrir (HT) telah menarik perhatian pemerintah. Meski HT mengklaim bahwa perjuangannya bersifat non-kekerasan, pemerintah Tajikistan menganggap ideologi dan aktivitas kelompok ini sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas politik. Kekhawatiran ini muncul bukan hanya karena isi ideologi HT yang ingin mengganti sistem pemerintahan sekuler dengan khilafah Islam, tetapi juga karena metode penyebarannya yang bersifat diam-diam namun menyebar luas, terutama di kalangan muda dan kelompok marjinal.

Pemerintah Tajikistan merespons dengan pendekatan keras. HT dinyatakan sebagai organisasi ilegal, dan berbagai tindakan represif dilakukan untuk menekan keberadaannya. Sejak awal 2000-an, aparat keamanan secara rutin menangkap dan memenjarakan individu yang diduga sebagai anggota atau simpatisan HT. Dalam satu tahun saja, tercatat puluhan orang dijatuhi hukuman penjara karena dianggap menyebarkan ideologi ekstremis atau memiliki literatur yang berkaitan dengan HT (International Crisis Group, 2003, p. 58).

Selain penangkapan, negara juga melakukan pelarangan terhadap publikasi, pertemuan keagamaan informal, dan aktivitas keagamaan di luar kendali resmi pemerintah. Tajikistan bahkan menerapkan kebijakan

pemantauan ketat terhadap masjid, madrasah, dan institusi pendidikan tinggi untuk mencegah penyebaran ide- ide Islam politik, termasuk HT. Sejumlah imam dan guru agama dicopot karena dicurigai menyebarkan paham radikal, atau karena dianggap tidak sejalan dengan narasi Islam moderat yang disahkan negara (Gupta, 2021).

Langkah-langkah represif ini tak lepas dari strategi keamanan regional yang didukung oleh negara-negara tetangga seperti Uzbekistan dan bahkan oleh aktor internasional seperti Rusia dan Amerika Serikat, terutama setelah tragedi 11 September 2001. Dalam iklim global “perang melawan teror”, negara-negara Asia Tengah diberi ruang dan legitimasi yang lebih besar untuk memberantas kelompok yang dianggap radikal termasuk HT, meskipun tidak terlibat kekerasan bersenjata (Heathershaw & Montgomery, 2014).

Namun, strategi represif ini juga menuai kritik. Banyak pengamat menilai bahwa tindakan keras negara justru memperkuat daya tarik HT di mata sebagian masyarakat. Ketika ruang politik ditutup dan ekspresi keagamaan dibatasi, HT tampil sebagai satu-satunya saluran oposisi ideologis, walau tersembunyi. Dalam beberapa kasus, represi justru memperkuat militansi atau mempercepat proses radikalisasi, karena individu merasa tidak punya jalan lain untuk mengekspresikan identitas dan aspirasi politiknya (Louw, 2007; McGlinchey, 2005).

Dengan demikian, hubungan antara negara dan HT di Tajikistan adalah hubungan yang bersifat konfrontatif dan saling menguatkan. Semakin negara menekan, semakin HT memposisikan diri sebagai korban represi dan menambah daya tarik di kalangan masyarakat yang kecewa atau teralienasi. Hal ini menciptakan siklus yang berbahaya, di mana represi tidak selalu berujung pada pembungkaman, tetapi justru menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi kelangsungan ideologi bawah tanah.

Hubungan Regional dan Internasional

Aktivitas Hizb ut-Tahrir (HT) di Tajikistan tidak dapat dipisahkan dari konteks regional Asia Tengah secara keseluruhan. Wilayah ini, terutama Lembah Fergana yang menjadi ruang gerak utama bagi HT karena letaknya yang strategis dan kompleksitas etnis-agamanya. Kawasan ini mencakup perbatasan antara Tajikistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan, dengan populasi Muslim yang kuat dan sejarah keagamaan yang panjang. HT menjadikan kawasan ini sebagai basis untuk menyebarkan ide khilafah, menjadikan batas-batas negara sebagai hambatan buatan yang bertentangan dengan prinsip persatuan umat Islam.

Negara-negara Asia Tengah memiliki pendekatan yang mirip dalam menangani HT, yakni melalui pelarangan, penangkapan, dan represi. Uzbekistan dikenal sebagai negara yang paling keras terhadap HT, bahkan sejak akhir 1990-an. Pendekatan ini kemudian memengaruhi sikap Tajikistan yang juga mulai melihat HT sebagai ancaman keamanan regional, bukan sekadar persoalan domestik (International Crisis Group, 2003, p. 58).

Selain itu, hubungan internasional memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan Tajikistan terhadap HT. Setelah peristiwa 11 September 2001, negara-negara Asia Tengah, termasuk Tajikistan, mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Rusia dalam kampanye global melawan ekstremisme Islam. Dalam konteks ini, HT sering dimasukkan ke dalam kategori “radikal” meskipun secara resmi menolak kekerasan. Dukungan logistik, pelatihan militer, dan legitimasi terhadap langkah-langkah represif menjadi bagian dari kerjasama regional dalam menghadapi gerakan seperti HT (Heathershaw & Montgomery, 2014).

Sementara itu, negara-negara seperti Iran dan Turki memiliki pendekatan yang berbeda. Iran cenderung netral namun berhati-hati, sedangkan Turki pernah secara terbuka mengkritik HT karena dianggap menciptakan citra negatif terhadap Islam politik. Meskipun tidak terlibat langsung, dinamika ini menunjukkan bahwa keberadaan HT telah menjadi isu global yang menyentuh banyak kepentingan lintas negara. Dengan demikian, keberadaan HT di Tajikistan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan ideologis dan politik yang tersebar luas, serta berada dalam pusaran kepentingan regional dan global.

Evaluasi dan Perkembangan Mutakhir (2015–2024)

Setelah pembubaran Partai Renaissance Islam Tajikistan (IRPT) pada tahun 2015, ruang politik bagi Islam moderat di Tajikistan semakin menyempit. Tidak adanya saluran legal untuk ekspresi Islam politik mendorong sebagian kelompok untuk mencari alternatif. Dalam konteks inilah HT semakin relevan bagi kalangan tertentu, meskipun tetap beroperasi secara tertutup dan ilegal.

Dalam beberapa tahun terakhir, HT mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dakwah. Mereka menggunakan media sosial, situs web, dan platform digital untuk menyebarkan ideologi, merekrut simpatisan, dan membangun jaringan lintas negara. Hal ini sejalan dengan tren globalisasi informasi, di mana kontrol negara atas ruang digital tidak seketat kontrol terhadap ruang fisik (Tucker, 2012). Namun, efektivitas HT di Tajikistan mulai mengalami tantangan. Represi negara terus meningkat, termasuk pengawasan ketat terhadap aktivitas daring. Selain itu, masyarakat juga mulai menunjukkan ketahanan terhadap ideologi radikal, terutama karena narasi khilafah sulit diterjemahkan ke dalam konteks lokal yang lebih pragmatis.

Di sisi lain, ada indikasi bahwa HT mulai menurun secara struktur dan daya tarik di Tajikistan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, ketatnya pengawasan keamanan; kedua, mulai berkembangnya wacana keagamaan lokal yang lebih moderat; ketiga, generasi muda Tajikistan yang lebih terhubung ke dunia global cenderung bersikap kritis terhadap utopia ideologis.

Meski begitu, HT belum benar-benar hilang, tetapi mereka tetap hidup di ruang-ruang tersembunyi dan menjadi simbol perlawanan

ideologis terhadap negara yang otoriter. Keberadaannya hari ini lebih mencerminkan gejala sosial daripada kekuatan politik nyata. Dalam arti tertentu, HT telah bertransformasi dari gerakan aktif menjadi lebih simbolik sebagai pengingat bahwa ideologi tidak mudah dibungkam oleh represi.

KESIMPULAN

Gerakan Hizb ut-Tahrir (HT) di Tajikistan muncul dalam konteks sosial-politik yang rapuh dan penuh ketegangan pasca-perang saudara (1992–1997). Perang tersebut tidak hanya menghancurkan secara fisik, tetapi juga meninggalkan kekosongan ideologis yang gagal dibentuk oleh negara. Dalam situasi tersebut, HT masuk dengan membawa narasi alternatif berupa khilafah Islamiyah sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem sekuler yang berlaku.

HT menyebarkan pengaruhnya melalui strategi non-kekerasan yang bersifat ideologis, seperti dakwah, literatur, serta diskusi kelompok yang bersifat tertutup. Meskipun gerakannya tidak menggunakan kekerasan, HT tetap dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Tajikistan karena doktrin yang menolak sistem negara nasional dan demokrasi. Hal ini membuat pemerintah merespons dengan kebijakan represif seperti pelarangan organisasi, penangkapan anggota, dan pengawasan ketat terhadap aktivitas keagamaan.

Peran HT di Tajikistan tidak dapat dilepaskan dari konteks regional Asia Tengah dan dinamika global pasca-9/11, di mana negara-negara seperti Uzbekistan, Rusia, dan Amerika Serikat ikut memengaruhi pendekatan terhadap gerakan Islam politik. HT menjadi bagian dari isu keamanan lintas batas, khususnya di kawasan Fergana Valley yang padat dan beragam secara etnis. Dalam perkembangan terakhir (2015–2024), meskipun HT menghadapi tekanan yang meningkat, termasuk dari ruang digital, ia tetap bertahan dalam bentuk simbolik dan bawah tanah. Gerakan ini beradaptasi dengan zaman, tetapi juga menghadapi tantangan dari dalam, seperti daya tarik ideologi khilafah yang mulai pudar di tengah arus globalisasi dan pragmatisme masyarakat muda.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Penulis setuju bertanggung jawab atas semua aspek dalam artikel ini.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan.

Referensi

Arya, R. K. (2022). The political role of Islam in post-colonial Central Asian republics. *International Journal of Multidisciplinary Educational Research*,

11(3[7]), 53–58.

Gupta, P. K. (2021). Situating Tajikistan in India's Central Asia policy: A strategic dimension. *Electronic Journal of Social and Strategic Studies*, 2(Special Issue IV), 64–67.

Heathershaw, J. (2009). *Post-conflict Tajikistan: The politics of peacebuilding and the emergence of legitimate order*. Routledge.

Heathershaw, J., & Montgomery, D. (2014). *The myth of post-Soviet Muslim radicalization in the Central Asian Republics*. Chatham House.

International Crisis Group. (2001). *Tajikistan: An uncertain peace* (Asia Report No. 30). ICG. [<https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/tajikistan/tajikistan-uncertain-peace>]

International Crisis Group. (2003). *Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb ut-Tahrir* (Asia Report No. 58). ICG. [<https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/uzbekistan/radical-islam-central-asia-responding-hizb-ut-tahrir>]

Jonson, L. (2006). *Tajikistan in the new Central Asia: Geopolitics, great power rivalry and radical Islam*. I.B. Tauris.

Karagiannis, E. (2006). Political Islam in Uzbekistan: Hizb ut-Tahrir al-Islami. *Europe- Asia Studies*, 58(2), 261–280.

Khamidov, A. (2003). Countering the call: The U.S., Hizb-ut-Tahrir, and religious extremism in Central Asia. *The Brookings Institution*. <https://www.brookings.edu/articles/countering-the-call/>

Louw, P. E. (2007). The rise of political Islam in Central Asia: Hizb ut-Tahrir al-Islami. *Global Change, Peace & Security*, 19(2), 85–95.

Lynch, D. (2001). The Tajik civil war and peace process. *Civil Wars*, 4(4), 49–72.

McGlinchey, E. (2005). Autocrats, Islamists, and the rise of radicalism in Central Asia. *Current History*, 104(684), 336–342.

Nourzhanov, K., & Bleuer, C. (2013). *Tajikistan: A political and social history*. ANU Press. Tucker, N. (2012). Hizb ut-Tahrir and the threat of terrorism in Central Asia. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 32(1), 132–146.

Zhussipbek, G. (2013). Religious radicalism in Central Asia (Rethink Paper No. 12).

Rethink Institute. (<https://www.rethinkinstitute.org/religious-radicalism-in-central-asia/>).